

ABSTRAK

ZULFIKAR. NIM. E. 1810281. **Penanganan Tersangka Kelompok Separatis Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kasus Penugasan Daerah Papua).** Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor. 2023.

Dalam kejahatan kelompok separatis tidak jarang terdapat pelanggaran HAM yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi hukum bagi para separatis, selain dia dapat mengajukan peninjauan kembali dan menuntut pembebasannya karena terpaksa menjalani hukuman atas tuduhan kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan. Para terpidana dapat menuntut ganti kerugian Rehabilitasi. Dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP dijelaskan tentang ganti kerugian sebagai berikut: Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Tujuan dalam penelitian ini antara lain, yaitu: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penanganan tersangka kelompok separatis dalam rangka mewujudkan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan prinsip keadilan dalam penugasan daerah Papua dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang hambatan yang dihadapi dalam penanganan tersangka kelompok separatis dalam rangka mewujudkan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan prinsip keadilan dalam penugasan daerah Papua. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Hasil penelitian diketahui bahwa penanganan tersangka kelompok separatis dalam rangka mewujudkan perlindungan Hak Asasi Manusia berdasarkan prinsip keadilan dalam penugasan Daerah Papua telah dilakukan dengan berbagai pendekatan dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi selama bertahun-tahun di Papua. Akan tetapi, pendekatan tersebut juga diiringi dengan berbagai macam operasi militer yang dilakukan untuk menumpas gerakan separatis OPM yang kemudian dikenal dengan KKB/ KSB yang tidak membuat keadaan lebih baik, justru kekerasan dan upaya untuk keluar dari Republik Indonesia semakin kuat.

Kata Kunci : Penanganan, Kelompok Separatis, Perlindungan, HAM, Keadilan

ABSTRACT

ZULFIKAR. NIM. E. 1810281. *Handling of Suspected Separatist Groups in the Context of Realizing Protection of Human Rights Based on the Principle of Justice (Case Study of Papua Region Assignment)*. Thesis: Faculty of Law, University of Juanda Bogor. 2023.

In the crimes of separatist groups, it is not uncommon for human rights violations to occur which in the end result in legal consequences for separatists, besides that they can file a review and demand their release because they are forced to serve a sentence for an alleged mistake they never committed. Convicts can claim compensation for rehabilitation. In Article 95 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code it is explained about compensation as follows: A suspect, defendant or convict has the right to demand compensation because he was arrested, detained, prosecuted and tried or subject to other actions, without reason based on law or because of a mistake regarding the person or applicable law. The objectives of this study include: 1) To find out and analyze the handling of suspected separatist groups in order to realize the protection of human rights based on the principle of justice in the assignment of the Papua region and 2) To find out and analyze the obstacles faced in handling suspected separatist groups in order to realize the protection of human rights based on the principle of justice in the assignment of the Papua region. The method used is an empirical research method, namely law as a symptom of society, as a social institution or patterning behavior. The results of the research show that the handling of suspected separatist groups in order to realize the protection of human rights based on the principle of justice in the assignment of the Papua region has been carried out using various approaches by the government to resolve conflicts that have occurred for years in Papua. However, this approach was also accompanied by various kinds of military operations carried out to crush the OPM separatist movement, which became known as the KKB/KSB which did not make things better, instead the violence and efforts to leave the Republic of Indonesia grew stronger.

Keywords: Handling, Separatist Groups, Protection, Human Rights, Justice